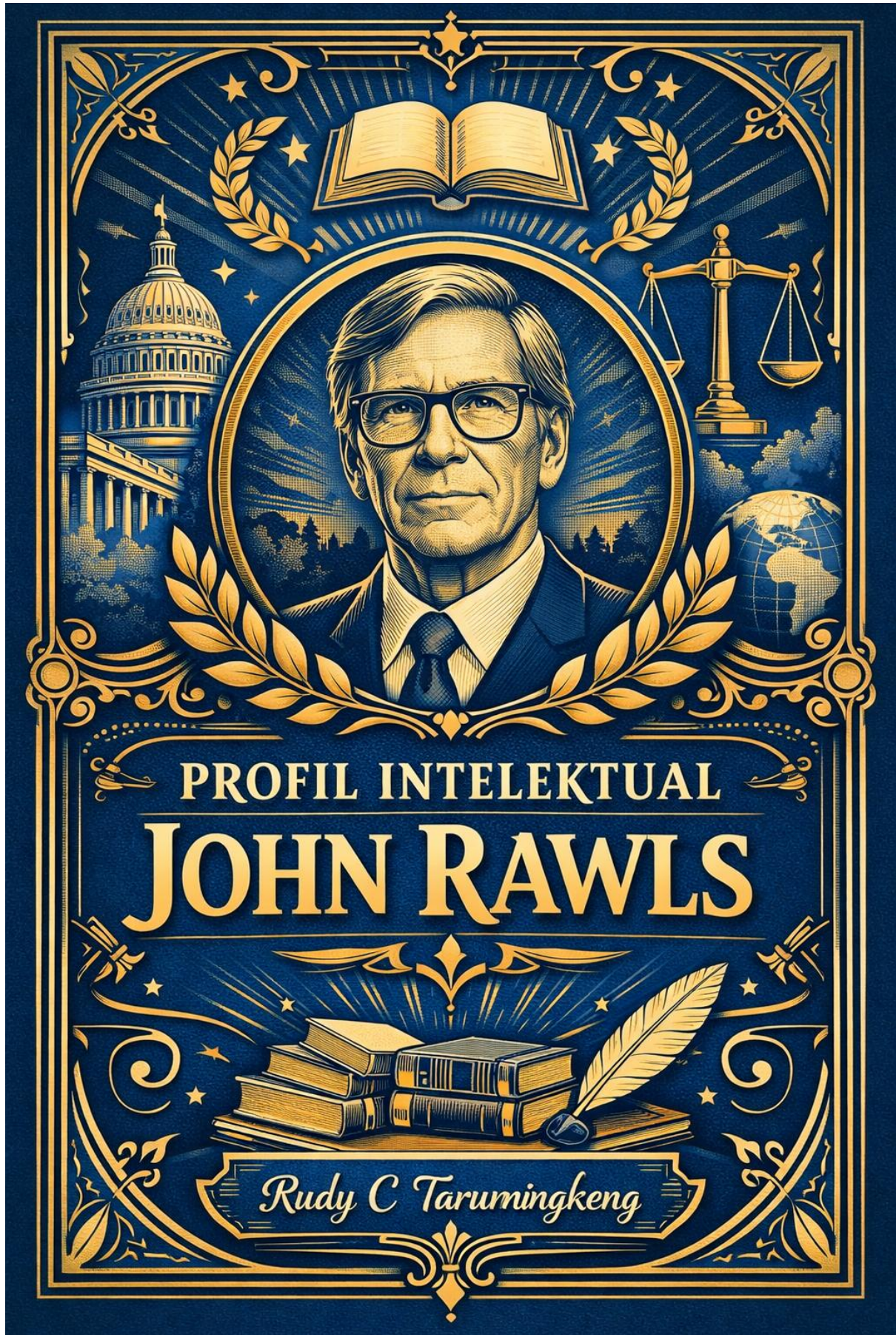




Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

20 April 2026

PROFIL INTELEKTUAL JOHN RAWLS

Abstrak

John Rawls merupakan salah satu filsuf politik paling berpengaruh pada abad ke-20 dan tetap menjadi titik rujukan utama dalam diskusi tentang keadilan, kebebasan, kesetaraan, legitimasi politik, dan tata institusi dalam masyarakat demokratis. Melalui karya monumentalnya *A Theory of Justice* (1971), Rawls menghidupkan kembali filsafat politik normatif di dunia Anglo-Amerika dan menawarkan sebuah kerangka konseptual yang dikenal sebagai *justice as fairness*. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami bukan semata-mata sebagai hasil distribusi yang baik, melainkan sebagai produk dari prosedur pemilihan prinsip yang fair, yang dibayangkan berlangsung dalam *original position* di bawah *veil of ignorance*. Dari situ Rawls merumuskan dua prinsip keadilan yang menempatkan kebebasan dasar yang setara dan perlindungan terhadap pihak yang paling kurang beruntung sebagai fondasi masyarakat yang adil. Pada tahap berikutnya, melalui *Political Liberalism* (1993), Rawls memperluas perhatiannya kepada masalah legitimasi politik dalam masyarakat pluralistik, terutama melalui konsep *public reason* dan *overlapping consensus*. Makalah ini membahas secara utuh siapa John Rawls, bagaimana latar biografinya, apa karya-karya utamanya, bagaimana struktur gagasannya, kritik-kritik yang diarahkan kepadanya, serta relevansi pemikirannya bagi isu-isu kontemporer seperti ketimpangan, demokrasi, pendidikan, kebijakan publik, dan keadilan sosial. Dengan demikian, John Rawls dipahami bukan sekadar sebagai tokoh filsafat, melainkan sebagai arsitek normatif bagi masyarakat demokratis modern. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Kata kunci: John Rawls, filsafat politik, keadilan, justice as fairness, original position, veil of ignorance, liberalisme politik, keadilan sosial.

Siapa dan Profil John Rawls: Biografi Intelektual, Gagasan Keadilan, dan Relevansinya bagi Dunia Kontemporer

Pendahuluan

Dalam sejarah filsafat politik modern, hanya sedikit pemikir yang pengaruhnya begitu luas seperti John Rawls. Namanya hampir selalu muncul ketika para akademisi, pembuat kebijakan, ahli hukum, dan pemikir sosial membicarakan keadilan distributif, hak-hak dasar, legitimasi politik, dan hubungan antara kebebasan dengan kesetaraan. Bila Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant memberi dasar-dasar besar bagi teori kontrak sosial dan martabat manusia, maka Rawls pada abad ke-20 dapat dikatakan sebagai tokoh yang memperbarui tradisi tersebut dalam bahasa institusi demokrasi modern. Itulah sebabnya berbagai sumber otoritatif menempatkannya sebagai filsuf politik paling penting atau paling berpengaruh pada abad ke-20. ([Encyclopedia Britannica](#))

Kebesaran Rawls terletak pada kemampuannya mengangkat kembali pertanyaan-pertanyaan moral yang sangat mendasar, tetapi dalam bentuk yang metodologis, sistematis, dan dapat diperdebatkan secara rasional. Ia tidak berhenti pada seruan normatif yang umum seperti "masyarakat harus adil" atau "pemerintah harus berpihak pada yang lemah." Sebaliknya, ia bertanya: prinsip-prinsip apa yang seharusnya dipilih untuk mengatur struktur dasar masyarakat, jika prinsip-prinsip itu ditentukan dari sudut pandang yang fair, tidak bias, dan tidak diwarnai oleh kepentingan pribadi? Dari pertanyaan semacam itu lahir salah satu eksperimen pemikiran paling

terkenal dalam filsafat modern, yaitu *original position* dengan *veil of ignorance*. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Makalah ini berangkat dari kebutuhan untuk menjelaskan John Rawls bukan hanya sebagai “siapa” dalam arti biografis, tetapi juga sebagai “profil intelektual” yang utuh. Dalam banyak penjelasan populer, Rawls sering direduksi menjadi tokoh yang memperkenalkan *veil of ignorance* atau tokoh yang berbicara tentang keadilan bagi orang miskin. Gambaran seperti itu tidak sepenuhnya salah, tetapi terlalu sempit. Rawls sesungguhnya membangun suatu sistem pemikiran yang meliputi teori keadilan domestik, teori legitimasi politik dalam masyarakat pluralistik, dan refleksi tentang tatanan internasional yang damai. Karena itu, untuk memahami profilnya secara tepat, kita harus melihat kehidupan, konteks intelektual, karya-karya utama, konsep-konsep pokok, serta perdebatan yang muncul dari gagasannya. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Di dalam ruang akademik, Rawls juga penting karena ia menghidupkan kembali filsafat politik normatif setelah suatu periode ketika filsafat moral dan politik cenderung bergerak ke arah analisis bahasa, empirisme, atau utilitarianisme teknokratis. Sesudah terbitnya *A Theory of Justice* pada tahun 1971, filsafat politik kembali membahas secara serius pertanyaan tentang apa yang membuat lembaga sosial adil, bagaimana kebebasan harus diprioritaskan, sampai sejauh mana ketimpangan ekonomi dapat diterima, dan apa kewajiban moral masyarakat terhadap mereka yang paling tidak beruntung. Dengan kata lain, Rawls bukan hanya seorang penulis buku penting; ia mengubah agenda disiplin. ([Encyclopedia Britannica](#))

Makalah ini bertujuan menjelaskan lima hal utama. Pertama, riwayat hidup dan latar intelektual John Rawls. Kedua, karya-karya besarnya dan perkembangan pemikirannya. Ketiga, konsep-konsep utama seperti *justice as fairness*, *original position*, *veil of ignorance*, dua prinsip keadilan, *difference principle*, *public reason*, dan *overlapping consensus*. Keempat, kritik-kritik penting terhadap Rawls dari berbagai kubu pemikiran. Kelima, relevansi John Rawls bagi tantangan kontemporer, termasuk ketimpangan

sosial, demokrasi pluralistik, pendidikan, dan kebijakan publik. Dengan demikian, tulisan ini dimaksudkan sebagai makalah utuh yang dapat dipakai sebagai bahan pengantar akademik maupun refleksi yang lebih luas tentang keadilan dalam dunia modern. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Riwayat Hidup John Rawls dan Pembentukan Latar Intelektualnya

John Bordley Rawls lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, dan wafat pada 24 November 2002 di Lexington, Massachusetts. Ia dikenal secara luas sebagai filsuf politik dan etika Amerika yang paling menonjol dalam tradisi liberal egalitarian. Britannica menyatakan bahwa ia paling dikenal melalui pembelaannya terhadap liberalisme egalitarian, khususnya dalam karya utamanya *A Theory of Justice*, dan secara luas dianggap sebagai filsuf politik paling penting pada abad ke-20. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa profil Rawls dalam sejarah intelektual bukan sekadar tokoh spesialis, tetapi figur sentral dalam pemikiran politik modern. ([Encyclopedia Britannica](#))

Rawls menempuh pendidikan tinggi di Princeton University. Setelah masa Perang Dunia II, ia kembali ke Princeton untuk studi pascasarjana dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1950. Tesis doktornya berjudul *A Study in the Grounds of Ethical Knowledge*. Setelah itu ia sempat mengajar di Princeton sebagai instruktur, lalu melanjutkan karier akademik di Cornell University dan Massachusetts Institute of Technology sebelum akhirnya bergabung dengan Harvard University pada 1962. Di Harvard, ia kemudian menjadi James Bryant Conant University Professor dan mengajar hingga masa pensiunnya, tetapi tetap aktif secara intelektual beberapa tahun setelah pensiun resmi. Riwayat ini memperlihatkan bahwa Rawls dibentuk oleh jalur akademik elite Amerika, tetapi karya-karyanya justru berbicara untuk persoalan universal mengenai keadilan dan legitimasi. ([Graduate School](#))

Salah satu unsur penting dalam pembentukan moral Rawls adalah pengalamannya selama Perang Dunia II. Berbagai biografi singkat menyebut bahwa ia bertugas di militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Walaupun tidak tepat untuk menghubungkan secara langsung seluruh teori Rawls dengan pengalaman perang, cukup masuk akal untuk mengatakan bahwa pengalaman historis generasinya—perang, totalitarianisme, krisis kemanusiaan, dan persoalan legitimasi lembaga politik—memberi latar konkret bagi kepekaannya terhadap martabat individu dan bahaya dari sistem yang memperlakukan manusia sekadar sebagai alat. Konteks ini menjadi penting karena Rawls kemudian membangun teori yang sangat menekankan bahwa individu memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dikorbankan demi manfaat agregat masyarakat. ([Graduate School](#))

Rawls juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana, tidak mengejar panggung publik, dan lebih menampilkan diri sebagai sarjana yang sangat tekun. Harvard Gazette mencatat bahwa karyanya mengubah filsafat moral dan politik di dunia berbahasa Inggris dan di luar itu, sementara NEH menegaskan posisinya sebagai tokoh yang pengaruhnya melampaui filsafat sempit, hingga menyentuh teori hukum, ilmu politik, dan perbincangan publik tentang hak dan keadilan. Profil seperti ini menarik: Rawls bukanlah intelektual yang terkenal karena gaya polemis atau retorika publik yang flamboyan, tetapi karena kekuatan argumen, ketelitian konseptual, dan kedalaman moral. Ia menunjukkan bahwa pengaruh besar dalam ilmu pengetahuan dapat lahir dari kesungguhan berpikir, bukan dari sensasi. ([Harvard Gazette](#))

Dalam konteks sejarah pemikiran, Rawls lahir pada masa ketika filsafat moral dan politik dalam tradisi Anglo-Amerika masih sangat dipengaruhi oleh utilitarianisme, positivisme logis, dan kecenderungan untuk menghindari penilaian normatif yang substansial. Karena itu, ketika Rawls kemudian menulis *A Theory of Justice*, ia bukan hanya memasuki perdebatan yang sudah ada, tetapi juga membelokkan arah perdebatan itu sendiri. Ia memperlihatkan bahwa pembicaraan tentang keadilan dapat

dilakukan secara rasional, sistematis, dan bukan sekadar ekspresi preferensi subjektif. Titik ini ditekankan dengan sangat jelas oleh Royal Swedish Academy of Sciences ketika memberinya Rolf Schock Prize pada 1999, yaitu karena *A Theory of Justice* dinilai memperbarui etika normatif dan filsafat politik serta memberi kontribusi penting pada metodologi etika normatif. ([Kungl. Vetenskapsakademien](#))

Karya-Karya Utama John Rawls

Karya John Rawls yang paling terkenal adalah *A Theory of Justice*, terbit pada 1971. Buku ini merupakan tonggak besar dalam filsafat politik modern. Britannica menyebutnya sebagai karya mayor Rawls dan suatu pembelaan penting atas liberalisme politik, sedangkan Royal Swedish Academy menegaskan bahwa buku ini merupakan titik balik dalam etika normatif dan filsafat politik abad ke-20. Melalui buku ini, Rawls mengajukan teori *justice as fairness* yang berusaha memadukan kebebasan dasar individu dengan komitmen yang kuat terhadap kesetaraan institusional. ([Encyclopedia Britannica](#))

Karya besar berikutnya adalah *Political Liberalism* yang terbit pada 1993. Buku ini penting karena menunjukkan perkembangan pemikiran Rawls setelah respons dan kritik terhadap *A Theory of Justice*. Dalam karya ini, Rawls tidak lagi hanya menanyakan apa prinsip keadilan yang tepat, tetapi juga bagaimana suatu tatanan politik liberal dapat memperoleh legitimasi di tengah masyarakat yang plural, yaitu masyarakat yang warganya memegang pandangan agama, moral, dan filsafat yang berbeda-beda. Britannica menegaskan bahwa dalam *Political Liberalism*, Rawls merevisi penjelasan mengenai dua prinsip keadilan dengan memperhatikan kenyataan pluralisme dalam demokrasi modern. ([Encyclopedia Britannica](#))

Pada 1999 Rawls menerbitkan *The Law of Peoples*, yang memperluas diskusi dari masyarakat domestik menuju masyarakat internasional. Dalam karya ini ia membahas bagaimana masyarakat liberal dan masyarakat yang ia sebut "decent" dapat hidup dalam tatanan internasional yang damai dan

saling menghormati. Stanford Encyclopedia menafsirkan karya-karya Rawls tentang *law of peoples* sebagai upaya merumuskan suatu visi kebijakan luar negeri liberal yang diarahkan pada terciptanya tatanan internasional yang toleran dan damai secara permanen. Ini menunjukkan bahwa Rawls tidak membatasi diri pada persoalan distribusi di dalam negara, tetapi juga memikirkan moralitas hubungan antarbangsa. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Karya penting lainnya adalah *Justice as Fairness: A Restatement* yang terbit pada 2001. Buku ini dapat dipahami sebagai semacam penegasan ulang, penjelasan, dan penyederhanaan dari keseluruhan teorinya setelah puluhan tahun perdebatan. Dalam arti tertentu, buku ini membantu pembaca melihat struktur pikir Rawls secara lebih jernih: dari prioritas kebebasan dasar, ke kesetaraan kesempatan, hingga pembelaan terhadap pihak yang paling kurang beruntung. Dengan demikian, profil intelektual Rawls dapat dilihat sebagai suatu perkembangan bertahap: dari teori keadilan domestik, menuju liberalisme politik dalam masyarakat plural, lalu ke hukum masyarakat bangsa-bangsa, dan akhirnya ke penyusunan ulang sistem teorinya. ([Encyclopedia Britannica](#))

Justice as Fairness: Gagasan Sentral Pemikiran Rawls

Jantung pemikiran John Rawls adalah konsep *justice as fairness*. Istilah ini penting karena menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, Rawls berbicara tentang keadilan sebagai prinsip yang harus mengatur struktur dasar masyarakat. Kedua, ia menegaskan bahwa prinsip keadilan yang sah harus lahir dari prosedur yang fair. Dengan kata lain, keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh intuisi belas kasihan, tradisi, atau hasil utilitarian, tetapi oleh pertanyaan apakah prinsip-prinsip tersebut akan dipilih dalam kondisi pemilihan yang tidak bias. Stanford Encyclopedia menekankan bahwa *justice as fairness* adalah kerangka Rawls untuk menggambarkan masyarakat warga bebas yang memiliki hak dasar yang setara dan bekerja sama dalam sistem ekonomi-politik yang egalitarian. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dalam kerangka ini, masyarakat dipahami sebagai suatu sistem kerja sama sosial antarmanusia yang berlangsung dari generasi ke generasi. Kerja sama itu menghasilkan manfaat, tetapi juga menimbulkan persoalan pembagian manfaat dan beban. Siapa mendapat apa? Siapa menanggung risiko apa? Siapa menikmati akses terhadap pendidikan, kesehatan, kekayaan, dan kekuasaan? Rawls melihat bahwa masyarakat tidak bisa hanya dipahami sebagai arena persaingan individual, melainkan sebagai struktur institusional yang sejak awal sudah menentukan kemungkinan hidup warga. Karena itu, keadilan terutama menyangkut apa yang ia sebut *basic structure of society*, yakni lembaga-lembaga utama seperti konstitusi, hukum, pasar, sistem pendidikan, dan tatanan politik. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Di titik ini Rawls sangat berbeda dari pandangan yang terlalu memusatkan perhatian pada kebajikan personal semata. Ia tentu tidak menolak etika pribadi, tetapi fokus utamanya adalah keadilan institusional. Bagi Rawls, masyarakat yang berisi banyak orang baik sekalipun belum tentu adil jika lembaganya sendiri didesain secara timpang. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan karakter individu masih dapat menjadi lebih adil bila struktur dasarnya disusun dengan prinsip yang fair. Perspektif ini sangat penting dalam ilmu sosial dan ilmu kebijakan, sebab ia menggeser perhatian dari moralitas individual ke desain sistem. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Original Position dan Veil of Ignorance

Untuk menjelaskan bagaimana prinsip keadilan yang fair dapat dipilih, Rawls membangun eksperimen pemikiran yang dikenal sebagai *original position*. Stanford Encyclopedia menjelaskan bahwa *original position* merupakan perangkat sentral dalam teori kontrak sosial Rawls, yaitu suatu sudut pandang yang fair dan imparial untuk menalar prinsip-prinsip dasar keadilan. Ini bukan gambaran tentang kontrak historis yang pernah sungguh-sungguh terjadi, melainkan model normatif yang membantu kita

bertanya: prinsip seperti apa yang akan dipilih bila semua orang harus memilihnya dalam kondisi yang adil. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Agar kondisi pemilihan itu sungguh-sungguh fair, Rawls memperkenalkan apa yang disebut *veil of ignorance* atau selubung ketidaktahuan. Di balik selubung ini, para pihak tidak mengetahui posisi sosial mereka sendiri, kelas ekonomi, bakat alamiah, agama, jenis kelamin, suku, kecerdasan, bahkan gagasan hidup baik yang akan mereka anut. Mereka tahu bahwa dalam masyarakat nanti akan ada keragaman dan kelangkaan sumber daya, tetapi mereka tidak tahu akan lahir sebagai siapa. Dengan cara ini, bias kepentingan pribadi disingkirkan. Tidak ada orang yang bisa menyusun prinsip demi mengamankan privilese dirinya sendiri karena ia belum tahu apakah nanti ia akan termasuk kelompok yang diuntungkan atau dirugikan. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Konstruksi ini menunjukkan kecanggihan moral Rawls. Ia tidak berasumsi bahwa manusia nyata selalu altruistik. Justru karena manusia bisa egois, status-conscious, dan bias, maka kita perlu membayangkan kondisi pemilihan yang memaksa orang menimbang masyarakat tanpa mengetahui keuntungan pribadinya. Dengan demikian, *veil of ignorance* adalah teknik moral untuk menghasilkan imparsialitas. Ia mengubah pertanyaan "sistem apa yang paling menguntungkan saya?" menjadi "sistem apa yang masuk akal untuk dipilih jika saya bisa saja menjadi siapa pun di dalamnya?" Itulah sebabnya konsep ini sangat sering dipakai dalam diskusi modern tentang keadilan sosial, bahkan di luar filsafat formal.

([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Secara pedagogis, konsep ini dapat dijelaskan lewat narasi sederhana. Bayangkan sekelompok orang diminta merancang negara baru. Mereka boleh menentukan aturan pajak, akses pendidikan, sistem kesehatan, perlindungan hak minoritas, dan struktur kesempatan ekonomi. Namun satu syarat diberlakukan: mereka tidak tahu apakah nanti akan lahir kaya atau miskin, sehat atau sakit, mayoritas atau minoritas, kota atau desa, berbakat atau biasa-biasa saja. Dalam kondisi seperti itu, kemungkinan besar mereka akan memilih aturan yang melindungi kebebasan dasar

semua orang dan memberi jaring pengaman yang kuat bagi mereka yang paling rentan. Logika inilah yang ingin ditunjukkan Rawls. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dua Prinsip Keadilan

Dari *original position* itulah Rawls berargumen bahwa para pihak rasional akan memilih dua prinsip keadilan. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan itu kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika terikat pada dua syarat: jabatan dan posisi harus terbuka bagi semua orang di bawah kondisi kesempatan yang fair, dan ketidaksetaraan itu harus memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Ringkasan semacam ini ditampilkan secara konsisten dalam Britannica, Stanford Encyclopedia, dan penjelasan resmi Royal Swedish Academy. ([Encyclopedia Britannica](#))

Prinsip pertama menempatkan kebebasan dasar pada prioritas yang sangat tinggi. Yang dimaksud Rawls adalah kebebasan-kebebasan fundamental seperti kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak memilih, dan jaminan terhadap perlakuan hukum yang adil. Rawls dengan tegas menolak gagasan bahwa hak-hak semacam itu boleh dikorbankan demi peningkatan kesejahteraan ekonomi agregat. Dalam masyarakat adil, setiap warga dipandang sebagai pribadi moral yang memiliki martabat dan klaim yang setara terhadap kebebasan dasar. Ini menjadikan Rawls jelas berada dalam tradisi liberal. ([Encyclopedia Britannica](#))

Namun Rawls bukan liberal pasar bebas yang membiarkan distribusi hasil sosial ditentukan semata-mata oleh mekanisme kompetisi. Prinsip kedua justru menunjukkan komitmen egalitariannya. Ia menegaskan bahwa distribusi kekayaan, pendapatan, dan posisi sosial tidak adil hanya karena dihasilkan oleh pasar atau karena dianggap efisien. Distribusi tersebut baru

sah bila kesempatan untuk memperoleh posisi terbuka secara fair dan bila ketidaksetaraan yang terjadi benar-benar mengangkat posisi mereka yang paling lemah. Dengan demikian, Rawls mencoba mengintegrasikan kebebasan dan kesetaraan, bukan menempatkan keduanya sebagai lawan yang tak terdamaikan. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Difference Principle dan Fair Equality of Opportunity

Salah satu elemen paling terkenal dalam teori Rawls adalah *difference principle*. Stanford Encyclopedia tentang *distributive justice* menjelaskan bahwa prinsip ini mengizinkan penyimpangan dari kesetaraan ketat hanya sejauh ketidaksetaraan tersebut membuat mereka yang paling kurang beruntung menjadi lebih baik daripada yang akan mereka alami di bawah distribusi yang setara. Dengan kata lain, Rawls bukan penganjur kesamaan absolut. Ia menerima bahwa beberapa ketidaksetaraan mungkin diperlukan, misalnya untuk mendorong inovasi, produktivitas, atau insentif kerja. Akan tetapi, ketidaksetaraan semacam itu harus dibuktikan memberi manfaat nyata bagi kelompok paling lemah, bukan hanya memperbesar keuntungan kelompok atas. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Di sini terlihat perbedaan mendasar antara Rawls dan pandangan yang memuliakan merit atau keberhasilan ekonomi tanpa batas moral yang tegas. Rawls menganggap bakat alamiah, kecerdasan, latar keluarga, dan kondisi kelahiran sebagai sesuatu yang secara moral bersifat kebetulan. Karena itu, tidak tepat jika masyarakat menganggap seluruh hasil yang lahir dari "keberuntungan alamiah" itu sebagai dasar moral penuh untuk klaim distribusi. Masyarakat boleh memberi insentif, tetapi hasil kerja sama sosial tetap harus diatur dengan memerhatikan nasib mereka yang kurang beruntung. Inilah salah satu dasar mengapa pemikiran Rawls kemudian menjadi sangat penting dalam diskusi tentang negara kesejahteraan, pajak progresif, pendidikan publik, dan redistribusi yang adil. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Rawls juga membedakan antara *formal equality of opportunity* dan *fair equality of opportunity*. Persamaan kesempatan formal hanya berarti bahwa semua orang secara hukum diperbolehkan bersaing untuk posisi tertentu. Akan tetapi, bagi Rawls, itu belum cukup. Kesempatan yang fair menuntut agar warga yang memiliki bakat dan motivasi yang sama tidak dirugikan secara sistematis oleh latar belakang sosial-ekonomi mereka. Jika anak dari keluarga kaya memperoleh nutrisi, sekolah unggulan, bimbingan, jaringan, dan rasa percaya diri yang jauh lebih baik dibanding anak dari keluarga miskin, maka sekadar mengatakan "semua boleh ikut ujian" belum memenuhi keadilan. Karena itu, prinsip Rawls mendorong perbaikan struktur awal kehidupan: pendidikan dasar, kesehatan, gizi, dan lingkungan tumbuh yang lebih setara. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dalam bahasa kebijakan, gagasan ini amat relevan. Program beasiswa bagi keluarga miskin, afirmasi pendidikan, layanan kesehatan universal, perbaikan sekolah di wilayah tertinggal, dan perlindungan anak dari kekurangan gizi dapat dibaca sebagai upaya mendekati *fair equality of opportunity*. Rawls mengingatkan bahwa kompetisi yang tampak netral sering kali beroperasi di atas fondasi sosial yang sangat tidak netral. Karena itu, masyarakat adil bukan hanya membuka pintu, tetapi juga memperbaiki tangga untuk naik ke pintu tersebut. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Kritik Rawls terhadap Utilitarianisme

Salah satu kontribusi paling penting Rawls adalah kritiknya terhadap utilitarianisme. Dalam pandangan utilitarian klasik, suatu kebijakan atau institusi dianggap baik bila ia memaksimalkan total utilitas atau kesejahteraan agregat. Masalahnya, pendekatan semacam itu dapat membenarkan pengorbanan kepentingan sebagian orang jika secara keseluruhan manfaat sosial meningkat. Britannica menegaskan bahwa dalam *A Theory of Justice*, Rawls menyatakan bahwa keadilan menuntut adanya hak-hak tertentu yang tidak boleh diabaikan, bahkan jika pengabaian tersebut akan meningkatkan kesejahteraan umum atau memenuhi keinginan mayoritas. ([Encyclopedia Britannica](#))

Rawls menolak cara berpikir yang memperlakukan masyarakat seakan-akan ia satu tubuh tunggal yang boleh “mengorbankan” sebagian anggotanya demi angka total yang lebih tinggi. Bagi Rawls, masyarakat adalah kerja sama antarpersonal yang masing-masing anggotanya memiliki klaim moral sendiri. Karena itu, hak-hak dasar tidak boleh ditundukkan pada kalkulasi agregatif. Kritik ini sangat penting karena membela martabat individu di tengah kecenderungan teknokratis yang menilai kebijakan hanya berdasarkan efisiensi atau output total. Rawls dengan demikian memperkenalkan kembali bahasa hak, fairness, dan pembatasan moral atas tujuan kolektif. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Secara naratif, kita dapat membayangkan sebuah pemerintah yang mengklaim keberhasilan ekonomi karena PDB tumbuh cepat, investasi meningkat, dan kota-kota besar menjadi lebih makmur. Tetapi jika di balik angka-angka itu terdapat wilayah-wilayah yang tertinggal, kualitas sekolah yang timpang, rumah sakit yang tidak merata, dan kelas pekerja yang tetap rapuh, maka perspektif Rawls akan menolak penilaian sukses yang terlalu cepat. Dalam kerangka Rawlsian, pertanyaan pokoknya adalah apakah struktur sosial tersebut fair, dan apakah mereka yang paling lemah sungguh memperoleh perbaikan posisi yang bermakna. Jadi, Rawls menantang “fetisisme angka total” dan menggesernya ke arah evaluasi moral atas institusi. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Political Liberalism: Pluralisme, Public Reason, dan Overlapping Consensus

Setelah *A Theory of Justice*, Rawls menyadari bahwa persoalan keadilan tidak dapat dilepaskan dari kenyataan pluralisme dalam masyarakat demokratis. Warga negara modern hidup dengan pandangan hidup yang beragam: berbeda agama, filsafat, moralitas, dan gambaran tentang kehidupan yang baik. Dalam *Political Liberalism*, Rawls berusaha menjawab pertanyaan berikut: bagaimana kekuasaan politik dapat dijalankan secara sah dalam masyarakat yang terdiri atas warga dengan doktrin-doktrin komprehensif yang berbeda? Britannica menegaskan bahwa karya ini

merevisi argumen Rawls dengan mengaitkannya pada kenyataan pluralistik demokrasi modern. ([Encyclopedia Britannica](#))

Salah satu jawaban Rawls adalah konsep *public reason*. Britannica mendefinisikan *public reason* sebagai ideal moral bahwa keputusan politik harus dapat dijustifikasi atau diterima secara masuk akal dari sudut pandang tiap individu dalam masyarakat demokratis yang plural. Bagi Rawls, ketika warga dan pejabat berdebat mengenai soal-soal konstitusional mendasar dan keadilan dasar, mereka seharusnya mengemukakan alasan-alasan yang bisa dibagi sebagai sesama warga, bukan semata-mata alasan yang hanya valid di dalam satu tradisi moral atau keagamaan tertentu. ([Encyclopedia Britannica](#))

Konsep lain yang penting adalah *overlapping consensus*. Meskipun hasil pencarian yang kita gunakan tidak merinci definisi formalnya secara tersendiri, Stanford Encyclopedia dan Britannica menjelaskan garis umumnya melalui pembahasan *Political Liberalism*: warga yang memegang pandangan hidup sangat berbeda tetap dapat bersepakat pada prinsip-prinsip politik yang sama, walaupun alasan terdalam mereka berbeda-beda. Seorang religius mungkin mendukung kebebasan beragama karena keyakinan teologis; seorang sekularis mendukungnya karena otonomi; seorang humanis mendukungnya karena martabat manusia. Mereka berbeda pada dasar metafisis, tetapi bertemu dalam dukungan pada institusi politik yang sama. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Gagasan ini amat penting bagi masyarakat majemuk. Rawls tidak meminta agar warga menghapus identitas religius atau moral mereka. Ia hanya meminta bahwa, ketika berbicara tentang aturan dasar yang mengikat semua orang, kita berusaha menggunakan bahasa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama warga sebagai warga. Ini adalah kontribusi besar Rawls bagi teori demokrasi: legitimasi politik bukan sekadar kemenangan suara mayoritas, tetapi juga kemampuan untuk memberi pembenaran publik yang fair di tengah perbedaan mendalam. Dalam era polarisasi politik dan ledakan media sosial, pelajaran ini terasa semakin relevan. ([Encyclopedia Britannica](#))

The Law of Peoples dan Cakrawala Internasional

Pemikiran Rawls tidak berhenti pada masyarakat nasional. Dalam karya-karyanya tentang *law of peoples*, ia mengembangkan refleksi tentang bagaimana masyarakat liberal harus berhubungan dengan masyarakat lain di dalam tatanan internasional. Stanford Encyclopedia merangkum pandangan ini sebagai upaya Rawls membayangkan suatu kebijakan luar negeri liberal yang diarahkan pada penciptaan tatanan internasional yang damai dan toleran. Fokus Rawls bukanlah negara sebagai mesin kekuasaan belaka, melainkan "peoples" atau masyarakat yang dipahami memiliki struktur politik dan tujuan bersama. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Salah satu ciri menarik dari pendekatan Rawls adalah toleransinya terhadap apa yang ia sebut masyarakat "decent" nonliberal. Rawls tidak menuntut agar semua masyarakat harus identik dengan demokrasi liberal Barat sebelum dapat diperlakukan dengan hormat. Selama suatu masyarakat nonliberal memiliki struktur yang cukup adil, tidak agresif, dan menghormati hak-hak dasar tertentu, Rawls membuka ruang bagi koeksistensi damai. Posisi ini sering dipandang lebih moderat dibanding universalisme liberal yang sangat ekspansif. Namun justru di sinilah muncul kritik, sebab sebagian pemikir keadilan global menganggap Rawls kurang egalitarian dalam ranah internasional dibanding dalam ranah domestik. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dalam konteks global kontemporer, pemikiran ini menarik karena dunia masih hidup di bawah ketegangan antara kedaulatan, pluralisme sistem politik, hak asasi manusia, dan tuntutan keadilan global. Rawls tidak menawarkan egalitarianisme global penuh, tetapi ia memberi bahasa untuk memikirkan toleransi antarrezim, batas legitimasi internasional, dan tanggung jawab masyarakat yang tertata baik terhadap masyarakat yang terbebani. Maka, walaupun fokus utama Rawls tetap pada keadilan dalam negara, cakrawala internasionalnya tetap memberi sumbangan penting bagi teori hubungan internasional normatif. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Pengaruh Intelektual dan Pengakuan terhadap Rawls

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa filsafat politik kontemporer dibagi menjadi masa sebelum Rawls dan sesudah Rawls. Stanford Encyclopedia menegaskan bahwa karya-karyanya memulai kembali filsafat moral dan politik normatif dalam tradisi Anglo-Amerika. Setelah Rawls, hampir semua diskusi utama tentang keadilan distributif, liberalisme, egalitarianisme, hak, dan legitimasi politik harus berhadapan dengan terminologi dan kerangka masalah yang ia buat. Bahkan para pengkritiknya berbicara dengan bahasa yang dibentuk oleh Rawls. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Pengaruh ini juga diakui secara resmi melalui berbagai penghargaan. Pada 1999 Rawls menerima National Humanities Medal. NEH mencatat bahwa ia mengajar di Harvard sejak 1962 dan terus mengajar hingga 1995 setelah pensiun resmi, sedangkan daftar penerima medalnya menampilkan Rawls sebagai penerima tahun 1999. Pada tahun yang sama, Royal Swedish Academy of Sciences menganugerahkan Rolf Schock Prize in Logic and Philosophy kepada Rawls atas *A Theory of Justice*, yang dinilai telah memperbarui etika normatif dan filsafat politik. Penghargaan-penghargaan ini mengukuhkan posisi Rawls tidak hanya sebagai pemikir kampus, tetapi sebagai salah satu arsitek moral utama dunia modern. ([NEH](#))

Kritik terhadap John Rawls

Meskipun sangat berpengaruh, Rawls juga menerima kritik dari berbagai arah. Dari kubu libertarian, kritik paling terkenal berasal dari Robert Nozick, yang menolak gagasan bahwa negara berhak melakukan redistribusi luas demi pola distributif tertentu. Harvard Gazette mencatat bahwa karya Nozick lahir sebagai tanggapan terhadap *A Theory of Justice*. Dalam pandangan libertarian, Rawls dianggap terlalu memberi ruang pada negara untuk mengoreksi hasil pasar, padahal yang lebih penting adalah menghormati hak milik dan kebebasan pertukaran. Kritik ini mempersoalkan apakah *difference principle* tidak berujung pada

pembatasan kebebasan ekonomi individu secara berlebihan. ([Harvard Gazette](#))

Dari kubu komunitarian, Rawls dikritik karena dianggap terlalu abstrak dalam menggambarkan subjek moral. Eksperimen seperti *original position* dipandang menggambarkan manusia seolah-olah dapat dipisahkan dari sejarah, komunitas, identitas, dan keterikatannya. Kritik ini menekankan bahwa manusia nyata selalu sudah menjadi anggota keluarga, budaya, agama, bahasa, dan bangsa tertentu. Karena itu, bagi komunitarian, keadilan tidak dapat dibangun sepenuhnya dari individu abstrak yang berada di balik selubung ketidaktahuan. Meskipun demikian, para pembela Rawls akan menjawab bahwa abstraksi itu justru diperlukan untuk menguji fairness secara imparsial. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dari perspektif feminis, teori Rawls juga dinilai belum cukup dalam menyoroti ketidakadilan gender, terutama di dalam keluarga dan pembagian kerja domestik. Kritik feminis sering menyatakan bahwa jika teori keadilan terlalu fokus pada struktur dasar formal seperti negara, hukum, dan pasar, maka ada risiko bentuk-bentuk dominasi yang berlangsung di ruang privat tidak terlihat secara memadai. Demikian pula, dari teori kritis dan teori ras, Rawls kadang dianggap kurang memberi perhatian pada struktur kuasa historis yang berkaitan dengan kolonialisme, rasisme, dan eksklusi sosial yang mengakar. Kritik-kritik ini tidak sepenuhnya menolak Rawls, tetapi menilai bahwa kerangka Rawlsian perlu diperluas agar lebih peka terhadap bentuk ketidakadilan yang lebih kompleks. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dalam ranah keadilan global, sebagian penulis menilai Rawls kurang konsisten. Di tingkat domestik, ia sangat egalitarian, tetapi di tingkat internasional ia tidak mengembangkan *difference principle* global. Stanford Encyclopedia tentang *international distributive justice* menunjukkan bahwa Rawls lebih menekankan tertatanya lembaga domestik masyarakat daripada ketimpangan global sebagai masalah utama antarmasyarakat yang tertata baik. Kritik terhadap posisi ini cukup tajam, terutama dari para pemikir kosmopolitan yang melihat bahwa tempat kelahiran antarnegara

juga merupakan bentuk “keberuntungan moral” yang tidak kalah penting dibanding bakat atau kelas dalam negara. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Namun secara keseluruhan, kritik-kritik tersebut justru mengonfirmasi kebesaran Rawls. Seorang pemikir disebut sangat berpengaruh ketika hampir semua aliran merasa perlu meresponsnya. Libertarian, komunitarian, feminis, kosmopolitan, hingga demokrat deliberatif, semuanya berdebat dengan Rawls. Artinya, ia telah menjadi titik poros yang membentuk tata bahasa intelektual filsafat politik kontemporer. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Relevansi John Rawls bagi Dunia Kontemporer

Mengapa John Rawls masih penting hari ini? Jawabannya sederhana tetapi mendalam: karena masalah yang ia hadapi masih tetap hidup, bahkan dalam banyak hal menjadi semakin tajam. Ketimpangan ekonomi melebar di berbagai negara, demokrasi menghadapi polarisasi, pluralisme keyakinan menjadi fakta sosial permanen, dan kebijakan publik kerap terjebak antara tuntutan efisiensi dengan tuntutan keadilan. Dalam konteks seperti itu, teori Rawls menawarkan kerangka normatif yang kuat untuk menilai apakah institusi-institusi kita fair, bukan hanya apakah ia efisien atau populer. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dalam kebijakan sosial-ekonomi, Rawls relevan untuk pertanyaan tentang pajak, subsidi, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Ia tidak mengajarkan bahwa semua orang harus memiliki hasil yang sama, tetapi bahwa ketidaksetaraan harus dapat dibenarkan dari sudut pandang mereka yang paling kurang beruntung. Di tengah dunia yang sering memuliakan pertumbuhan ekonomi tanpa memeriksa siapa yang benar-benar menikmati hasilnya, Rawls mengingatkan bahwa keadilan menuntut lebih dari sekadar kenaikan rata-rata. Ia menuntut struktur kelembagaan yang memungkinkan warga yang paling rentan memperoleh perbaikan posisi yang nyata dan bermartabat. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dalam dunia pendidikan, Rawls sangat berguna untuk memikirkan kesetaraan kesempatan. Universitas, sekolah, dan sistem seleksi sering kali tampak netral, padahal beroperasi di atas fondasi sosial yang timpang. Anak dari keluarga berkecukupan biasanya memiliki akses yang jauh lebih besar pada gizi baik, literasi, kursus tambahan, teknologi, lingkungan belajar yang tenang, dan jaringan sosial pendukung. Jika negara hanya berkata "semua orang boleh ikut ujian," maka ia baru memenuhi persamaan formal, belum keadilan kesempatan yang fair. Rawls menolong kita melihat bahwa keadilan pendidikan menuntut koreksi atas ketimpangan titik awal kehidupan. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Dalam politik demokrasi, gagasan *public reason* dan *overlapping consensus* sangat relevan untuk masyarakat majemuk. Ketika wacana publik dipenuhi fanatisme, kebencian, klaim kebenaran eksklusif, dan perpecahan identitas, Rawls mengajarkan etika politik yang lebih dewasa: warga tidak perlu meninggalkan keyakinan terdalamnya, tetapi harus belajar menjustifikasi keputusan publik dengan alasan yang dapat dipahami dan diterima bersama sebagai sesama warga negara. Prinsip ini tidak menghapus konflik, tetapi mendorong konflik itu berlangsung dalam horizon saling menghormati. Demokrasi, dalam pandangan ini, bukan sekadar menang suara, melainkan membangun legitimasi bersama di tengah ketidaksetujuan yang wajar. ([Encyclopedia Britannica](#))

Bagi konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, Rawls memberi bahasa yang penting untuk membahas pemerataan lintas wilayah, akses terhadap layanan dasar, dan kualitas institusi publik. Pertanyaan Rawlsian yang relevan adalah: jika kita belum tahu akan lahir di pusat kota atau daerah terpencil, dalam keluarga kaya atau keluarga miskin, sebagai mayoritas atau minoritas, sistem sosial-politik seperti apa yang akan kita pilih? Pertanyaan ini sangat kuat secara moral karena memaksa perancang kebijakan keluar dari sudut pandang kelompok beruntung. Ia menuntun kita kepada penataan institusi yang lebih sensitif terhadap mereka yang secara historis tertinggal. Ini bukan sekadar slogan keadilan sosial, tetapi

kerangka berpikir untuk desain kebijakan. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Di era kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan transformasi teknologi, Rawls juga tetap relevan. Teknologi menciptakan peluang besar, tetapi juga risiko konsentrasi kekayaan, kekuasaan data, dan eksklusi baru. Kerangka Rawls dapat membantu menilai apakah manfaat teknologi dibagikan secara fair, apakah akses terhadap pendidikan digital cukup merata, apakah kelompok rentan terlindungi dari dampak otomatisasi, dan apakah kebebasan dasar—termasuk privasi dan kebebasan berpikir—tetap dijaga. Dengan demikian, meskipun Rawls menulis sebelum ledakan AI dan platform digital saat ini, prinsip-prinsipnya masih sangat berguna untuk menilai keadilan institusi abad ke-21. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Penutup

John Rawls adalah tokoh sentral dalam filsafat politik modern. Lahir pada 1921 dan wafat pada 2002, ia meninggalkan warisan intelektual yang sangat besar melalui karya-karya seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, *The Law of Peoples*, dan *Justice as Fairness: A Restatement*. Karya-karya ini mengubah arah filsafat politik dengan mengembalikan ke pusat pertanyaan tentang keadilan, hak, legitimasi, dan struktur dasar masyarakat. Rawls menunjukkan bahwa kebebasan dan kesetaraan tidak harus dipertentangkan secara simplistik; keduanya dapat diintegrasikan melalui prinsip-prinsip keadilan yang dipilih dari sudut pandang yang fair. ([Encyclopedia Britannica](#))

Kontribusi terpenting Rawls adalah *justice as fairness*, yang dibangun melalui *original position* dan *veil of ignorance*. Dari sana ia merumuskan dua prinsip keadilan yang memberi prioritas pada kebebasan dasar yang setara serta menuntut agar ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya dibenarkan jika memperbaiki posisi mereka yang paling kurang beruntung. Pada tahap berikutnya, Rawls memperluas teorinya menjadi liberalisme politik yang menekankan *public reason* dan *overlapping consensus* sebagai

syarat legitimasi dalam masyarakat plural. Dengan demikian, Rawls bukan hanya teoritikus distribusi, tetapi juga filsuf kewargaan demokratis.

([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Sekalipun menuai kritik dari libertarian, komunitarian, feminis, dan kosmopolitan, justru kritik-kritik itu memperlihatkan luasnya pengaruh Rawls. Ia menjadi pusat perdebatan, bukan tokoh pinggiran. Hari ini, ketika dunia menghadapi ketimpangan, polarisasi, pluralisme nilai, dan tantangan keadilan di era teknologi, pemikiran Rawls tetap relevan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat yang baik tidak cukup dinilai dari kekayaan total, efisiensi pasar, atau suara mayoritas, tetapi dari fairness struktur institusinya dan dari cara ia memperlakukan mereka yang paling rentan. Dalam makna itulah John Rawls tetap hidup sebagai salah satu guru besar moral politik dunia modern. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Glosarium

Basic structure of society

Struktur dasar masyarakat, yaitu lembaga-lembaga utama seperti konstitusi, sistem hukum, pasar, keluarga, dan pendidikan yang sangat menentukan distribusi hak, kewajiban, peluang, serta sumber daya sosial.

([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Difference principle

Prinsip yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan itu memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. ([Stanford Encyclopedia of](#)

[Philosophy](#))

Fair equality of opportunity

Kesetaraan kesempatan yang fair, yakni kondisi ketika individu dengan bakat dan motivasi yang sama memiliki peluang yang sungguh-sungguh

setara untuk meraih posisi sosial, tidak sekadar setara secara formal di atas kertas. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Justice as fairness

Nama teori keadilan Rawls yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang sah adalah prinsip yang akan dipilih melalui prosedur yang fair dan imparsial. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Liberalisme politik

Tahap perkembangan pemikiran Rawls yang menekankan bagaimana tatanan politik liberal dapat tetap legitimate di tengah masyarakat yang plural secara moral, filosofis, dan religius. ([Encyclopedia Britannica](#))

Original position

Situasi hipotetis yang fair dan imparsial tempat para pihak memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi mereka sendiri dalam masyarakat. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Overlapping consensus

Kesepakatan yang tumpang tindih, yaitu kondisi ketika warga dengan doktrin komprehensif yang berbeda-beda mendukung prinsip politik yang sama meskipun alasan terdalam mereka berbeda. ([Encyclopedia Britannica](#))

Public reason

Ideal moral dalam demokrasi yang mengharuskan keputusan politik mengenai persoalan dasar dapat dijustifikasi dengan alasan yang masuk akal bagi semua warga. ([Encyclopedia Britannica](#))

Two principles of justice

Dua prinsip Rawls yang terdiri dari: kebebasan dasar yang setara bagi semua orang, serta pengaturan ketidaksetaraan sosial-ekonomi melalui kesetaraan kesempatan yang fair dan *difference principle*. ([Encyclopedia Britannica](#))

Utilitarianisme

Pandangan moral-politik yang menilai kebijakan atau institusi terutama berdasarkan kemampuannya memaksimalkan kesejahteraan atau utilitas

total; Rawls mengkritiknya karena dapat mengorbankan hak individu demi manfaat agregat. ([Encyclopedia Britannica](#))

Veil of ignorance

Selubung ketidaktahuan dalam *original position* yang membuat para pihak tidak mengetahui status, bakat, kelas, agama, atau identitas mereka sendiri, sehingga mereka dipaksa memilih prinsip keadilan secara tidak bias.

([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Blake, M. (2013). *International distributive justice*. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Britannica. (2026, March 20). *A Theory of Justice*. Encyclopaedia Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Britannica. (2026, April 10). *John Rawls*. Encyclopaedia Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Britannica. (n.d.). *Political Liberalism*. Encyclopaedia Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Britannica. (n.d.). *Public reason*. Encyclopaedia Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Freeman, S. (2008/2023). *Original position*. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Harvard Gazette. (2002, November 25). *John Rawls, influential political philosopher, dead at 81*. Harvard University. ([Harvard Gazette](#))

Harvard Gazette. (2005, May 19). *John Rawls*. Harvard University. ([Harvard Gazette](#))

Lamont, J. (1996). *Distributive justice*. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

National Endowment for the Humanities. (1999, September 29). *National Humanities Medalists, 1999*. ([NEH](#))

National Endowment for the Humanities. (n.d.). *John Rawls: National Humanities Medal*. ([NEH](#))

Princeton University Graduate School. (n.d.). *John B. Rawls*. ([Graduate School](#))

Royal Swedish Academy of Sciences. (1999, May 18). *The 1999 Rolf Schock Prizes*. ([Kungl. Vetenskapsakademien](#))

Royal Swedish Academy of Sciences. (n.d.). *John Rawls: Rolf Schock Prize – Logic and philosophy 1999*. ([Kungl. Vetenskapsakademien](#))

Wenar, L. (2008). *John Rawls*. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 20 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69e5a642-c674-83a1-b10d-cf684f54f9f2>